

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM *MAPPADECENG*

DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SOPPENG

Oleh :

CINDY VATIKA SARI

NOMOR INDUK MAHASISWA : 105611108416



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM *MAPPADECENG*

DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SOPPENG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan oleh :

CINDY VATIKA SARI

Nomor Stambuk : 105611108416

12/03/2021

1 cap
Smb. Alumnī

P/0610/ADN/21 CD
SAR
e'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di
Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Cindy Vatika Sari

Nomor Induk Mahasiwa : 105611108616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahir, M.Si **Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Nasrul Haq, S.Sos., MPA**
NBM: 730727 NBM: 1067463

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Vatika Sari
Nomor Induk Mahasiwa : 1056111084 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Cindy Vatika Sari

ABSTRAK

Cindy Vatika Sari, Muhammad Tahir, Samsir Rahim. Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam suatu organisasi, kegiatan ataupun program. Kemiskinan terjadi sebab ketidakberdayaan masyarakat untuk berhenti dari permasalahan kemiskinan. Program *Mappadeceng* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini Tringulasi sumber, Tringulasi Teknik, dan Tringulasi Waktu.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng belum efektif sesuai dengan rencana, terutama dalam segi sosialisasi program yang belum maksimal hal ini dikarenakan sosialisasi ke masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh. Namun beberapa indikator yang sudah tercapai yaitu ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program yang telah tercapai sesuai rencana. Diharapkan kedepannya pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Soppeng lebih mengoptimalkan programnya dari segala aspek demi tercapainya visi misi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Kata Kunci : *efektivitas, kemiskinan, mappadeceng.*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Kedua Orang Tua Saya Bapak Palesangi dan Ibu Ma'awia dan juga segenap Keluarga Besar Tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan spirit bantuan baik bentuk moril maupun materil.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ibu Nurbiah Tahir
5. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau Asistennya, seluruh Staff Pegawai diruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan seluruh Informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Para Jametku (Hasna, Mega, Indah, Epa, Piang, dan Agus) terima kasih karena sudah menjadi teman yang tidak pernah absen dalam suka dan duka penulis. Menjadi salah satu penyemangat penulis termasuk dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Saudara-seperjuangan Angkatan Ilmu Administrasi Negara Federasi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan Toga.
10. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 05 Januari 2021


Cindy Vatika Sari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Konsep Efektivitas..... | 9 |
| 1. Pengertian Efektivitas..... | 9 |
| 2. Ukuran Efektivitas..... | 10 |
| C. Konsep Kemiskinan..... | 15 |
| D. Konsep Program <i>Mappadeceng</i> | 20 |
| E. Kerangka Pikir..... | 21 |
| F. Fokus Penelitian..... | 22 |
| G. Deskripsi Fokus..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 24 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 24 |
| C. Informan..... | 25 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 27 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| F. Teknik Pengabsahan Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 30 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Hasil Penelitian | 49 |
| C. Pembahasan | 66 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian terdahulu | 7 |
| Tabel 3.1 Informan penelitian | 26 |
| Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng | 31 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng | 32 |
| Tabel 4.3 Keadaan Struktur Tim Koordinasi | 43 |
| Tabel 4.4 Data Penerima Program <i>Mappadeceng</i> di Kabupaten Soppeng yang termuat dalam DTKS | 46 |
| Tabel 4.5 Data Realisasi Anggaran penerima Program <i>Mappadeceng</i> di Kabupaten Soppeng | 49 |
| Tabel 4.6 Jumlah penerima program Rastra (2018-2020) | 60 |
| Tabel 4.7 Data Penerima program Kube (2020) | 60 |
| Tabel 4.8 Data penerima program bedah rumah (2018) | 61 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang penting pada masa kini di Indonesia, sehingga merupakan salah satu fokus ketertarikan bagi Indonesia. Kemiskinan dapat dilihat dari segi kemiskinan absolut yang berarti sebagai deprivasi atau kekurangan atas kebutuhan dasar manusia untuk layak hidup, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

Kemiskinan terjadi sebab ketidakberdayaan masyarakat untuk berhenti dari persoalan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi program yang dilaksanakan oleh daerah. Penanggulangan kemiskinan ialah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dibuat secara terencana, bersinergi dan sistematis melalui dunia usaha dan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meninggikan derajat kesejahteraan rakyat. (Peraturan Bupati No.3 tahun 2018)

Menurut Sajogyo dalam Takdir (2013) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan penghasilan rumah tangga senilai 360 Kg beras per tahun di perkotaan dan 240 Kg beras per tahun di pedesaan. Pengukuran garis kemiskinan ini menurut Sajogyo dapat dipakai untuk memperbandingkan tingkat hidup antar zaman dan antar ragam nilai rupiah.

Program *mappadeceng* merupakan gerakan yang terbentuk dari optimisme dan kegelisahan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, penanganan serta efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial perlu adanya gerakan yang terpadu dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan salah satunya program *Mappadeceng*.

Dengan adanya program *Mappadeceng* ini diharapkan agar kelompok sasaran yang merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin yang termuat dalam basis data terpadu mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gerakan *mappadaceng* ini mencakup beberapa sektor yang ada di pemerintahan seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, dengan pelaksanaan akan di koordinasikan langsung bersama dengan SKPD yang terkait.

Sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Mappadeceng* Soppeng menimbang, a) Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah pendekatan dan penanganan yang terpadu menyeluruh dan sistematis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban serta memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, b) Bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, c) Bahwa untuk meningkatkan pelayanan,

penanganan, dan penanggulangan kemiskinan serta efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial perlu adanya gerakan yang terpadu dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang belum tertanggulangi sampai saat ini. Program-program yang dilakukan untuk mengurangi masalah kemiskinan selalu di upayakan pemerintah pusat maupun daerah, namun pada realitanya masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Hal ini dilihat dalam table angka statistik yang memberikan penjelasan tentang masih banyaknya jumlah penduduk miskin di kabupaten Soppeng, sebagai berikut :

Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp 253.457,00/orang/bulan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin nomor lima paling sedikit jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya (BPS, 2018). Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Soppeng turun sebesar 0,79% disbanding tahun 2017 yaitu dari 18.763 menjadi 16.995 jiwa pada tahun 2018.

Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa yang menggunakan dana APBD pada tahun 2018 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Rastra sebanyak 1.462 dengan jumlah APBD sebesar Rp. 1.315.000.000 kemudian pada tahun 2019-2020 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Rastra sebanyak 1.462 dengan jumlah APBD sebesar Rp. 1.754.400.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu

rupiah). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kelompok yang menerima bantuan kube sebanyak 6 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-

Dari hasil survey yang telah ada, maka pemerintah melakukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang memihak masyarakat miskin. Selama ini, banyak program pembangunan dari pemerintahan yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dinas sosial kabupaten Soppeng tersebut merupakan suatu kesatuan dimana program ini di program kan kembali agar dapat tersentuh ke sasaran program atau masyarakat miskin.

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dicky Pradana Putra pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep”. Dalam pelaksanaan program RS-RTHL di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan sosial di Kabupaten Sumenep hal ini dapat dilihat dari karakteristik karyawan dalam mengemban tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dari program RS-RTHL dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan hingga renovasi rumah tersebut selesai.

Untuk pencapaian hasil sesuai yang diinginkan oleh Kabupaten Soppeng belum tercapai dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya warga yang belum tersentuh bantuan dari program *mappadeceng* ini salah satunya warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni dan belum mendapatkan bantuan berupa program bedah rumah. Belum maksimalnya program ini pun diharapkan

agar bisa memacu seluruh SKPD untuk bergerak bersama untuk memaksimalkan program *Mappadeceng* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana Efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* yang dijalankan oleh pemerintah khususnya pemerintah di Kabupaten Soppeng. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan mahasiswa umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai bahan acuan/rujukan bagi yang tertarik di dalam bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Soppeng.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian terhadap penerapan program *mappadeceng*, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sebelumnya pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan maka penulis mencantumkan bebrapa referensi dalam penulisan jurnal yang terdapat dibawah ini.

Adapun penelitian terdahulu yang memebahas mengenai efektivitas pelaksanaan program antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------------|---|---|--|
| 1. | Elvira Astuti Pane, (2018). | Efektivitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggiraja Kabupaten Asahan . | a. Pemahaman program b. Tepat sasaran c. Tepat waktu d. Perubahan nyata e. Tercapainya tujuan | Berdasarkan analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas program beras sejahtera untuk masyarakat miskin di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggiraja Kabupaten Asahan bisa dikatakan efektif berdasarkan hasil analisa data dengan jumlah rata-rata dari pemahaman program sebanyak 0,61, ketepatan sasaran 0,57, ketepatan waktu 0,48, perubahan nyata 0,06, dan tercapainya tujuan sebanyak 0,39. |
| 2. | Asti Prichatin, | Efektivitas Program Keluarga | a. Ketepatan sasaran | Dalam pelaksanaan Program Keluarga |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | (2019). | Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) | b. program c. Sosialisasi program d. Tujuan program e. Pemantauan program | Harapan yang dilaksanakan di Desa Kesegeran dilihat dari semua variable sudah sangat efektif. Dengan adanya PKH telah membawa bebrapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada keluarga penerima manfaat PKH. |
| 3. | Fahreza, Jauhar Arifin dan Lilis Suryani, (2019). | Efektivitas Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser . | a. Tepat sasaran b. Tepat jumlah c. Tepat harga d. Tepat waktu e. Tepat kualitas f. Tepat | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser berjalan efektif 63,8% dan tidak ada faktor penghambat dalam program beras sejahtera di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. |

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian yang akan dilakukan berfokus pada capaian efektivitas program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dimana dalam pelaksanaannya belum efektif. Sedangkan ketiga penelitian terdahulu di atas pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan baik atau efektif.

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa Inggris, efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas:

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010:175), memberikan penjelasan bahwa dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakan. Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Ahadi (2010:3) yaitu suatu organisasi barangkali bias efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat tujuan organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah Tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya 2010:176).

Lain halnya dengan pendapat Robbins dalam Indrawijaya (2010:175), bahwa "Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, tingkat kehidupan organisasi, dan minat mengevaluasi". Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya

(2010:175), mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas,waktu)telah tercapai. Tingkat efektivitas semakin tinggi dipengaruhi oleh besarnya target yang dicapai”. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. Menurut pendapat P.Robbins Stephen (2010:8) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum yang dikutip oleh Indrawijaya (2010:188) mendefinisikan “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga bagaimana mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran”.

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat tercapai.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang amat sederhana, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang serta tergantung pada siapa yang menafsirkan dan menilainya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, bahwa seorang manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kuantitas dan kualitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga bias diukur dengan menilai antara rencana yang sudah ditentukan oleh hasil nyata yang sudah diwujudkan. Namun, jika usaha

maupun hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak akurat sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai maupun sasaran yang diharapkan, sehingga hal itu dikatakan tidaklah efektif.

Menurut beberapa ahli, ada jenis pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010:177), menjelaskan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*). Pendekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*).
- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi
- c. Pendekatan konstituensi-strategi (*strategic-constituencies approach*). Pada pendekatan ini, agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus
- d. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai.

Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010:187), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut SYSTEM MODEL yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

a. Adaptasi

Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.

c. Motivasi

Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.

d. Produksi

Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi

Pandangan Georgepoulus dan Tannenbaum dalam Indrawijaya(2010:197-188),menjelaskan bahwa suatu pendekatan yang diperoleh lebih dipertanggungjawabkan, seperti yang diajukan oleh para peneliti, ialah suatu system pengukuran efektivitas yang menerapkan beberapa unsur yang bias diperoleh dalam kehidupan organisasi yang efektif. Hasil studi menunjukkan adanya

penggunaan 3 unsur, yakni produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstrn). Steers mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Mustofa (2015:17) yaitu :

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlabar
- e. Pencarian sumber daya

Sama dengan Steers yang mengembangkan model proses dalam menilai efektivitas organisasi dengan menggunakan tiga sudut pandang. Unsur atau dimensi yang pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai, yaitu apabila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian atau alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Selanjutnya ialah penekanan pada aspek perilaku yang telah memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam aktivitas suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan mengenai pandangan dan penilaian efektivitas organisasi tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal :

- a. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya adalah

bagaimana cara mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumber daya dan dana yang tersedia.

- b. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran
- c. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

Streers dalam Lestari (2016:39) mengungkapkan ada tiga indikator dalam mengukur efektivitas. Ia mengatakan bahwa indikator tersebut sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan ialah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, agar perolehan tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik dalam artian pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti prioritasnya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-indikator, yaitu: sasaran dan kurun waktu yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi adalah mengukur tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi serta pengembangan konsensus.

Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan organisasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bersangkutan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan di lapangan.

Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

a. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

C. Konsep Kemiskinan

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya program *Mappadeceng*

adalah untuk membantu masyarakat miskin agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencapai kehidupan yang layak dan lebih baik.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek social dan moral. Sholeh dalam Ali khomsan dkk (2015:1)

Menurut Angraeni dalam Ali khomsan dkk (2015:8) Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis dan kondisi lingkungan.

Kebutuhan pokok bisa diterjemahkan dalam suatu paket jasa dan barang yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat hidup secara manusiawi terdiri dari keperluan air bersih, komposisi pangan bernilai gizi cukup, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok biasanya diakibatkan oleh :

1. Persepsi manusia akan kebutuhan pokok yang diperlukan
2. Posisi manusia di dalam lingkungan sekitarnya
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Garis kemiskinan (*poverty line*) bisa dibedakan antara garis kemiskinan makanan (*food poverty line*) maupun garis kemiskinan non makanan (*non food poverty line*). Yang karena perbedaan harga dan jenis komoditas yang dipakai maka besaran garis kemiskinan bias pula berbeda antar daerah dan antar desa-kota. Kemudian, melalui garis kemiskinan tersebut penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya berada pada dan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu penduduk tidak miskin adalah penduduk yang pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan. (Yohandarwati dalam Ali khomsan dkk (2015:7) .Sedangkan menurut Sajogyo dalam Takdir (2013) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan penghasilan rumah tangga senilai 360 Kg beras per tahun di perkotaan dan 240 Kg beras per tahun di pedesaan. Pengukuran garis kemiskinan ini menurut Sajogyo dapat dipakai untuk memperbandingkan tingkat hidup antar zaman dan antar ragam nilai rupiah.

Menurut pendapat Suyanto dalam Nurjanah (2017:51), ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan, yaitu :

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relative terisolasi atau tdiak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang

dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah yang dilakukan secara terencana, bersinergi dan sistematis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi merupakan wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan guna melakukan pemenuhan hak dasar, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, dan pengurangan beban hidup,
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan akses ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4. Program-program lainnya yang baik secara tidak langsung ataupun langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat miskin.

D. Konsep Program *Mappadeceng*.

Program *Mappadeceng* merupakan program untuk membantu masyarakat miskin. *Mappadeceng* di ambil dari bahasa bugis yang dalam bahasa indonesia adalah memperbaiki, yang dimana juga sebagai membetulkan (Kesalahan, Kerusakan dan Sebagainya). Program *Mappadeceng* ini merupakan program yang strategis dan kegiatan yang dilatar belakangi oleh masih adanya masyarakat kita yang masih miskin seperti kita, mereka akan digerakkan untuk mencapai kehidupan yang layak dan lebih baik.

Selain itu, program *mappadeceng* di setiap SKPD wajib membina suatu daerah wilayah binaannya, untuk mengetahui apa permasalahan ditengah masyarakat.

Maksud gerakan program *Mappadeceng* adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan persoalan kemiskinan dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan.
- b. Untuk memberikan solusi dari permasalahan melalui kegiatan dengan pola Tri Gerakan *Mappadeceng* (tri gema), yaitu Gema Manusia, Gema Lingkungan dan Gema Usaha.
- c. Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dengan mensinergikan program SKPD dan Pemerintah desa dengan Perbankan, BUMN/BUMD, LSM, Perguruan Tinggi,

Pengusaha dan Tokoh Masyarakat.

1. Tujuan Program *Mappadeceng*

Tujuan pelaksanaan program gerakan *Mappadeceng* Soppeng adalah sebagai berikut :

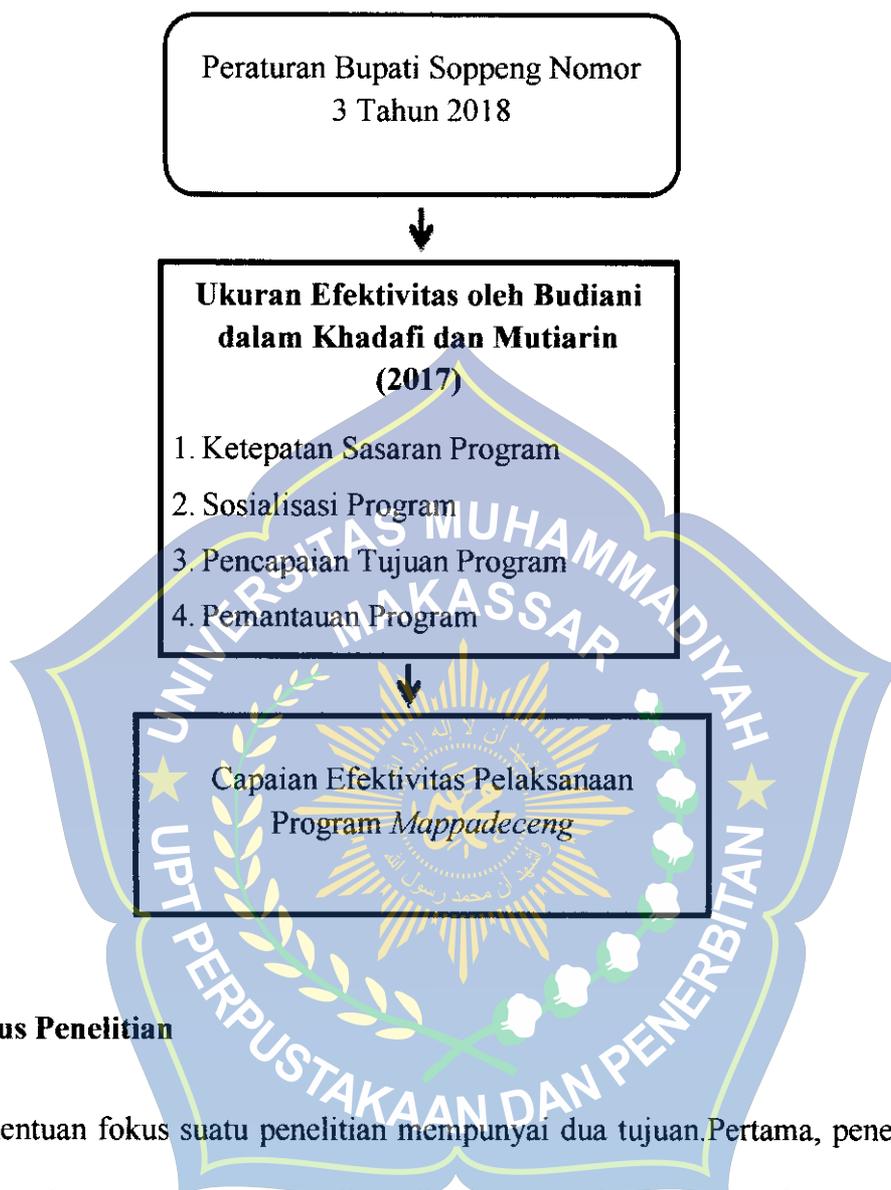
- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng di semua tingkatan pemerintahan dalam meengkordinasikan penanganan penanggulangan kemiskinan.
- b. Memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
- c. Mengoptimalkan seluruh potensi yang telah terdapat percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga sasaran dan tujuan program penanggulangan kemiskinan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

E. Kerangka Pikir

Efektivitas program dapat dijalankan oleh kemampuan operasional di dalam menyelenggarakan program-program kerja yang selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, secara komprehensif.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017). Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng.

Gambar 2.1 . Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus ini dapat membatasi studi, jadi di dalam keadaan ini fokus hendak membatasi bidang *inquiry* (penyelidikan). Kedua, penetapan fokus ini juga berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan - mengeluarkan atau *inklusi - eksklusi* suatu informasi yang terdapat di lapangan.

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Program *Mappadeceng* Kabupaten Soppeng dengan

menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017).

1. Ketetapan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan program

Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan.

G. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ketepatan Sasaran Program yaitu dengan melihat sejauh mana data penerima program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sesuai dengan sasaran yang tepat yang sudah ditentukan oleh kriteria BPS.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pengelola program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga informasi program *Mappadeceng* dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. Pencapaian Tujuan Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keselarasan antara hasil dari Program *Mappadeceng* dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.
4. Pemantauan Program, yaitu pengawasan yang dilaksanakan setelah Program *Mappadeceng* dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi ini penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Sosial kabupaten Soppeng. Peneliti memilih lokasi di Dinas Sosial karena program ini merupakan kebijakan terbaru di Kabupaten Soppeng dan juga fenomena masalah terkait efektivitas pelaksanaan program *Mappadeceng* yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Soppeng. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua bulan).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong dalam Prichatin (2019:44) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat

sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

C. Informan

Teknik pemilihan informan pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya rang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjalani obyek/situasi social yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data yaitu pemilihan informan. Penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, ada beberapa informan dalam Program *Mappadeceng* yaitu :

| No. | NAMA INFORMAN | Inisial | PEKERJAAN |
|-----|---------------------------|---------|---|
| 1. | Nur Inaya, SE, M.Si | NI | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. |
| 2. | Drs. Sudani Endang Suyono | SES | Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. |
| 3. | Amran, SE | AM | Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. |
| 4. | H. Agus, S.Sos | HA | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan. |
| 5. | Laussa | LU | Masyarakat |
| 6. | Herianti | HE | Masyarakat |
| 7. | Fatima | FA | Masyarakat |
| 8. | Samira | SA | Masyarakat |
| 9. | Rahmawati, SKM | RA | Masyarakat |
| 10. | Latala | LT | Masyarakat |
| 11. | Lasinna Uleng | LU | Masyarakat |
| 12. | I Bunga | IB | Masyarakat |

Tabel 3.1. Informan Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data ini adalah dengan melihat atau mengamati secara langsung situasi dan kondisi, tempat penelitian dilakukan. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan

mengidentifikasi Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan melalui berbagai sumber data yang ada dan berhubungan dengan masalah kondisi objektif dan pendukung data lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang didapat dari hasil catatan, wawancara, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, membuat dan memilih kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri atau orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memusatkan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data ialah proses berfikir sensitif yang membutuhkan keluasan dan kecerdasan dalam kedalaman wawasan

tinggi. Dalam penelitian ini penelitian ini peneliti memilah data yang akan dibutuhkan dalam efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan maupun bagian tertentu. Batasan yang diberikandi dalam penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyaji data dilakukan dengan cara memaparkan atau mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara dengan informan terkait dengan efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan pemeriksaan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Terhitung dari awal memasuki lokasi penelitian serta selama proses pengumpulan data. Penelitian menganalisis dan mencari tema, pola, hubungan persamaan, hal-hal yang terkadang timbul dan dikemukakan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah standar validitas dari sebuah data yang diperoleh. Menurut Yuliani dalam Sugiyono (2012:373), terdapat tiga macam tringulasi yang menentukan keabsahan data yaitu :

1. Tringulasi sumber

Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2. Tringulasi teknik

Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama menggunakan teknik berbeda.

3. Tringulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tringulasi jenis tringulasi sumber yaitu dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan program *mappadeceng*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di WatanSoppeng. Berada pada 4°6'00'' hingga 4°32'00'' Lintang Selatan dan 119°47'18'' hingga 120°06'13''Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan di Soppeng bertopografi dataran.

Luas Wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km² dengan batas-batas wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng dilalui beberapa sungai sebagai sumber yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai langkemme, sungai Soppeng, sungai lawo, sungai paddangeng dan sungai lajaroko.

Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah sebesar 320 km² atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupaten Soppeng. Sedangkan

Citta merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 40 km² atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat Kabupaten. Jarak dari kecamatan menuju ibukota Kabupaten berkisar antara 0 km hingga 35 km. Dengan jarak dari ibukota Kabupaten sebesar 35 km, kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng. Sedangkan Lalabata yang beribukota di WatanSoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibukota Kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah Soppeng.

Tabel 4.1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Soppeng

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|-----|-------------|---|---|
| 1. | Citta | - | 1. Citta 2. Kampiri 3. Labac 4. Tinco |
| 2. | Donri-Donri | - | 1. Donri-Donri 2. Kessing 3. Labokong 4. Lalabata Riaja 5. Leworeng 6. Pesse 7. Pising 8. Sering 9. Tottong |
| 3. | Ganra | - | 1. Belo 2. Enrekeng 3. Ganra 4. Lompulle |
| 4. | Lalabata | 1. Bila 2. Botto 3. Lalabata Rilau 4. Lapajung 5. Lemba 6. Ompo 7. Salokaraja | 1. Maccile 2. Mattabuhu 3. Umpungeng |
| 5. | Liliriaja | 1. Appanang 2. Gahung 3. Jennac | 1. Barang 2. Jampu 3. Pattojo 4. Rompe Gading 5. Timusu |
| 6. | Lilirilau | 1. Cabenge 2. Macanrc 3. Pajalesang 4. Ujung | 1. Abbanuange 2. Baringeng 3. Kebo 4. Masing |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| | | | 5. Palangiseng 6. Parenring 7. Paroto 8. Tetewatu |
| 7. | Marioriawa | 1. Attang Salo 2. Batu-batu 3. Kaca 4. Limpomajang 5. Manorang Salo | 1. Buluc 2. Laringgi 3. Panincong 4. Patampanua 5. Tellu Limpoc |
| 8. | Marioriwawo | 1. Labessi 2. Tettikenrerac | 1. Barac 2. Congko 3. Gattareng 4. Gattareng Toa 5. Goarie 6. Marioriaja 7. Mariorilau 8. Mariotengnga 9. Soga 10. Watu 11. Watu Toa |

Sumber : Kabupaten Soppeng

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng | Presentase (%) |
|-----|-------|---|----------------|
| 1. | 2016 | 19.120 Jiwa | 8,45% |
| 2. | 2017 | 18.763 Jiwa | 8,29% |
| 3. | 2018 | 16.995 Jiwa | 7,50% |
| 4. | 2019 | 16.450 Jiwa | 7,25% |

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

Tingkat kemiskinan di kabupaten soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks.

1. Profil Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng merupakan lembaga pemerintahan Kabupaten Soppeng yang mempunyai 3 bidang yaitu bidang rehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin, dan bidang perlindungan jaminan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Soppeng bertempat di Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Kec, Lalabata Kabupaten Soppeng.

Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yaitu:

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng adalah merupakan pandangan yang jauh kedepan, karena visi inilah yang akan memberikan gambaran secara jelas kemana dan bagaimana Dinas Sosial harus berbuat dan berkarya agar supaya konsisten dan dapat eksis, antipatif, inovatif serta produktif dalam memberikan layanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Soppeng merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng :

“Mengutamakan Tanggung Jawab Sosial Yang Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera”

b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng :

Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan sosial yang ditandai dengan semangat nilai kesetiakawanan sosial.

- 1) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan sosial dilandasi semangat nilai kesetiakawanan,

- 2) Mengembangkan prakara dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai infestasi sosial,
- 3) Memperkuat ketahanan sosial dengan upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat yang belum beruntung,
- 4) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial
- 5) Pengembangan SDM, aparatur dan tenaga kerja sosial masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
- 6) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2. Strukur organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifita dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada suatu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

3. Tugas dan wewenang

a. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan

peraturan perundang undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
- 2) Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
- 3) Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
- 4) Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
- 5) Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagiseluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kabuipaten Soppeng.

1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan

Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

4. Bidang Perlindungan Jaminan Kesehatan

Bidang perlindungan jaminan kesehatan memiliki tugas melakukan kegiatan perlindungan sosial bencana alam, perlindungan sosial bencana sosial serta jaminan sosial keluarga.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, tuna sosial, korban perdagangan orang, disabilitas dan lansia

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengembangan sumber dana, melakukan pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta melakukan pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan serta restorasi sosial

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas melaksanakan kegiatan melakukan kegiatan penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan serta melakukan pendataan fakir miskin.

4. Wewenang Dinas Sosial

Kewenangan Dinas Sosial diantaranya:

- a. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah Kabupaten/kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Penyuluhan dan bimbingan sosial
- c. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)
- d. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten/kota
- e. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
- f. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana)
- h. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi

- i. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan
- j. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup Kabupaten / kota
- k. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
- l. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
- m. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup Kabupaten/kota
- n. Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten/kota
- o. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
- p. Penanggulangan korban napza
- q. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
- r. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
- s. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota.
- t. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota
- u. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten / kota
- v. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial

5. Program *Mappadeceng*

Program *Mappadeceng* asal mulanya yaitu Bupati terpilih H.A. Kaswadi Razak, SE dan Wakil Bupati terpilih Supriansyah, SH. MH mencetuskan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, memberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat tergolong miskin, mereka akan kami gerakkan untuk mencapai kehidupan yang layak dan lebih baik.

Olehnya itu Program *Mappadeceng* merupakan program pemerintah Kabupaten Soppeng. Program ini merupakan suatu kesatuan dimana program yang telah ada di program kan kembali agar dapat tersentuh ke sasaran program atau masyarakat miskin. Selain itu, program *mappadeceng* di setiap SKPD wajib membina suatu daerah binaannya, untuk mengetahui apa permasalahannya ditengah masyarakat. Program ini diluncurkan pada kegiatan perayaan malam tahun baru 2018 dan ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018. Adapun dasar hukum pelaksanaan *mappadeceng* sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 13) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 577/DYS.3/KPTS/10/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

a. Tujuan Program *Mappadeceng* Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau rentan miskin melalui program-program bantuan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

b. Persyaratan Penerima Program *Mappadeceng* Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Persyaratan penerima program *mappadeceng* adalah masyarakat miskin yang tergolong dalam Data yang saat ini mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut:

- 1) Penerima Program Beras Miskin (RASKIN)
- 2) Penerima Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 3) Penerima Program Bantuan Rumah

c. Kategori Penerima Program *Mappadeceng*

Dalam pemilihan penerima manfaat program *mappadeceng* Ada beberapa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sesuai dengan kriteria miskin menurut standar BPS:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu/murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang.
- 8) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/piliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000.-.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd.

14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor / non kredit,emas,ternak,kapal,motor atau barang modal lainnya.

d. Verifikasi Data Penerima Program *Mappadeceng*

Penentuan penerima Program *Mappadeceng* berdasarkan dari hasil verifikasi desa/kelurahan yang direkap di Kecamatan untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Soppeng untuk proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sasaran penerima Program *Mappadeceng* yang telah melalui proses verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

Verifikasi data penerima Program *Mappadeceng* dilakukan setiap setahun sekali melalui usulan data dari Desa/ Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendataan dan pelaksanaan program *mappadeceng*.

e. Susunan struktur tim koordinasi dan percepatan pelaksanaan program *mappadeceng* Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2018:

Tabel 4.3. Keadaan Struktur Tim Koordinasi

| | | |
|------|--------------------------|---|
| I. | Penanggung Jawab: | Bupati Soppeng |
| II. | Wakil Penanggung Jawab : | Wakil Bupati Soppeng |
| III. | Ketua: | Sekretaris Daerah Kab.Soppeng |
| IV. | Wakil Ketua : | Asisten Perekonomian, Pembangunan Dan Kesra Setda Kab. Soppeng |
| V. | Sekretaris : | Kepala |
| VI. | Wakil Sekretaris : | Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Soppeng |
| VII. | Bidang | |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

- a. Bidang perencanaan
 1. Kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Soppeng
 2. Kasubag program dinas sosial Kabupaten Soppeng
 3. Kasi pendataan fakir miskin dinas sosial Kabupaten Soppeng
- b. Bidang sosialisasi dan perundang-undangan
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
 2. Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Setda Kabupaten Soppeng
 3. Kasubag Perundang-Undangan Dan Dokumentasi Hukum Dasar Setda Kabupaten Soppeng

c. Bidang Pelayanan

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
5. Kepala Dinas Perikanan Dan Ketahan Pangan Kabupaten Soppeng
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Soppeng
7. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
13. Direktur Rumah Sakit Umum Latemmamala Kabupaten Soppeng

14. Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda
Kabupaten Soppeng

d. Bidang Pemantauan/ Monitoring Dan Evaluasi

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
4. Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
5. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng

e. Camat sekab. Soppeng

1. Kasi penanganan fakir miskin perkotaan
2. Kasi penanganan fakir miskin pedesaan
3. Staf dinas sosial Kabupaten Soppeng

Tabel 4.4 Data Penerima Program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng yang termuat dalam DTKS

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ruta | Jiwa |
|-----|-------------|----------------|------|------|
| 1. | Marioriwawo | Gattareng | 509 | 2240 |
| | | Marioriaja | 580 | 2250 |
| | | Watu | 477 | 1806 |
| | | Marioritengnga | 485 | 1754 |
| | | Goarie | 317 | 990 |
| | | Barae | 152 | 415 |
| | | Mariorilau | 588 | 1953 |
| | | Tettikenrarae | 535 | 1859 |

| | | | | |
|----|-----------|----------------|-------------|--------------|
| | | Labessi | 320 | 1260 |
| | | Congko | 252 | 869 |
| | | Watu Tuo | 508 | 1953 |
| | | Gattareng Toa | 239 | 863 |
| | | Soga | 163 | 535 |
| | | Jumlah | 5125 | 18747 |
| 2. | Citta | Kampiri | 210 | 721 |
| | | Citta | 309 | 1053 |
| | | Labae | 243 | 825 |
| | | Tinco | 134 | 427 |
| | | Jumlah | 896 | 3026 |
| 3. | Lilirilau | Pajalesang | 450 | 1597 |
| | | Cabbeng | 535 | 1536 |
| | | Paroto | 189 | 552 |
| | | Palangiseng | 204 | 605 |
| | | Tetewatu | 97 | 236 |
| | | Abbanaunge | 175 | 503 |
| | | Parenring | 286 | 812 |
| | | Ujung | 375 | 1122 |
| | | Masing | 215 | 723 |
| | | Baringeng | 790 | 2227 |
| | | Kebo | 403 | 1354 |
| | | Macanre | 364 | 1369 |
| 4. | Liliriaja | Jumlah | 4083 | 12636 |
| | | Timusu | 570 | 2218 |
| | | Rompegading | 285 | 1024 |
| | | Pattojo | 283 | 954 |
| | | Galung | 329 | 1188 |
| | | Jennae | 664 | 2473 |
| | | Jampu | 442 | 1529 |
| | | Barang | 207 | 709 |
| | | Appanang | 625 | 2164 |
| | | Jumlah | 3405 | 12259 |
| 5. | Lalabata | Umpungeng | 537 | 2071 |
| | | Lalabata Rilau | 574 | 2088 |
| | | Botto | 361 | 1360 |
| | | Lemba | 174 | 678 |
| | | Bila | 472 | 1764 |
| | | Mattabulu | 336 | 1268 |
| | | Ompo | 195 | 586 |
| | | Lapajung | 310 | 1110 |
| | | Maccile | 247 | 1779 |

| | | | | |
|----|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | Salokaraja | 179 | 569 |
| 6. | Ganra | Jumlah | 3385 | 13273 |
| | | Belo | 249 | 756 |
| | | Ganra | 280 | 993 |
| | | Enrekeng | 208 | 687 |
| | | Lompulle | 342 | 1141 |
| | | Jumlah | 1079 | 3577 |
| 7. | Donri-Donri | Pesse | 511 | 2077 |
| | | Pising | 365 | 1212 |
| | | Labokong | 321 | 1015 |
| | | Donri-Donri | 202 | 711 |
| | | Sering | 349 | 1050 |
| | | Lalabara Riaja | 367 | 1102 |
| | | Tottong | 428 | 1468 |
| | | Leworeng | 198 | 651 |
| | | Kessing | 235 | 815 |
| 8. | Marioriawa | Jumlah | 2976 | 10101 |
| | | Patampanua | 224 | 704 |
| | | Panincong | 427 | 1558 |
| | | Tellullimpoe | 392 | 1292 |
| | | Attangsalo | 223 | 703 |
| | | Kaca | 388 | 1230 |
| | | Limpomajang | 468 | 1678 |
| | | Batu-batu | 278 | 962 |
| | | Manorangsalo | 421 | 1358 |
| | | Laringgi | 599 | 2080 |
| | | Bulue | 623 | 2227 |
| | | Jumlah | 4043 | 13792 |
| | | Jumlah Keseluruhan | 24992 | 87411 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Penerima manfaat program *mappadeceng* ini merupakan masyarakat yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Di dalam lingkup Dinas Sosial jumlah masyarakat yang menerima program *mappadeceng* pada tahun 2018 dalam bantuan bedah rumah sebanyak 5 rumah untuk masing-masing SKPD, sedangkan dalam bantuan rastra pada tahun 2018-2020 sebanyak 1.462 KPM setiap tahunnya, untuk bantuan kube sendiri baru dilaksanakan kembali pada tahun 2020 dengan penerima sebanyak 6 kelompok dengan beranggotakan mulai dari 5-10 orang.

Tabel 4.5. Tabel Realisasi Anggaran Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

| No. | Uraian Program dan Kegiatan | Tahun | | | Jumlah |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Program Beras Sejahtera (Rastra) | 1.315.000.000 | 1.754.400.000 | 1.754.400.000 | 4.823.800.000 |
| 2. | Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) | - | - | 85.000.000 | 85.000.000 |
| 3. | Program Bantuan Rumah | 150.000.000 | - | - | 150.000.000 |
| Total | | 1.465.000.000 | 1.754.400.000 | 1.839.400.000 | 5.058.800.000 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap kegiatan berbeda-beda. Realisasi anggaran program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sebesar 5.058.800.000. Pada tahun 2018 jumlah penerima program sebanyak 1.467 dengan anggaran sebesar Rp. 1.465.000.000,- dan pada tahun 2019 penerima program sebanyak 1.462 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.754.400.000,- sedangkan pada tahun 2020 jumlah penerima sebanyak 1.505 dengan anggaran sebesar Rp. 1.839.400.000,-.

B. Hasil Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

1. Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

Program *Mappadeceng* adalah program dari Bupati Soppeng dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin atau rentan miskin melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yaitu untuk mengurangi beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dan mempermudah akses ekonomi. *Mappadeceng* merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Dalam hal ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng penulis menggunakan teori ukuran efektivitas Menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) dengan menggunakan empat ukuran yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan. Menurut Budiani keefektifan suatu kebijakan dilihat dari empat hal yang perlu dipenuhi. Pertama, ketepatan sasaran program, yang kedua adalah sosialisasi program, yang ketiga adalah pencapaian tujuan program dan yang ke empat adalah pemantauan program.

Dalam lingkup wilayah Kabupaten Soppeng Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Mappadeceng* Soppeng dalam rangka meningkatkan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2018 dan di laksanakan pada bulan maret 2018.

Sesuai dengan teori Budiani yang penulis gunakan dalam melihat Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan dengan teori ukuran efektivitas menurut Budiani.

a. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target atau sasaran dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng dengan maksud agar program ini menjadi program yang dapat membantu masyarakat miskin atau kurang mampu yang ada di Kabupaten Soppeng.

Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana penerima program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketepatan penentuan siapa saja sasaran program *mappadeceng* yang dalam hal ini adalah kelompok sasaran program *mappadeceng* yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin yang termuat dalam Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipilih melalui beberapa kriteria menurut standar BPS.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Litbang Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

“Kalo untuk pemilihan penerima itu bukan kita yang tentukan, penduduk miskin itu pemerintah pusat yang tetapkan dengan kriterianya mereka, itu di masing-masing SKPD itu sudah ada semua ya. Disini kita hanya menerima saja data nama, alamat si A dan si B”

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan indikator ketepatan sasaran program dapat dipahami dan disimpulkan bahwa dalam penentuan penerima sasaran program *mappadeceng* di Kabupaten Soppeng ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ada di masing-masing SKPD, seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Dinas Sosial :

”Sasaran untuk program ini kalau untuk di lingkup atau bagian Dinas Sosial itu ada 14 kriteria sesuai dengan ketentuan sosial tetapi yang namanya orang miskin itu itukan semua daerah tidak sama, pada prinsipnya di desa begitu juga kelurahan menentukan batas kriterianya dari 14 itukan tidak mungkin, karena yang namanya keluarga miskin itu sudah namanya hukum mutlak. Tentu batasan miskin ini secara nasional 14 kriteria tetapi pada umumnya di Kabupaten Soppeng dimusyawarahkan itu warga yang dianggap tidak mampu atau miskin itu minimal 9 atau 10 kriteria dari 14 itu” (Hasil wawancara dengan SES, pada tanggal 15 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator untuk mengukur jumlah penduduk miskin selama ini dilakukan dengan menggunakan 14 kriteria sebagai acuan, adapun indikator yang paling sering menjadi patokan dalam penentuan rumah tangga miskin minimal 9 kriteria yaitu : (1) Luas bangunan, (2) jenis lantai dan dinding (3) fasilitas buang air besar, (4) sumber penerangan, (5) pendidikan terakhir kepala keluarga, (6) jenis bahan bakar untuk memasak,

(7) akses ke puskesmas (8) Sumber penghasilan, dan (9) kepemilikan beberapa aset.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagai berikut :

“Dalam penentuan sasaran program menurut saya sudah sesuai ya, karena mereka dipilih melalui kriteria masyarakat miskin itu ada 14 kriteria tetapi tidak semua yang diambil hanya beberapa dari kriteria tersebut Itu ditentukan dengan hasil musyawarah desa dan kelurahan melibatkan RT, RW, LPMD, LPMK dan semua kepentingan ketika menentukan bahwa warganya kategori miskin berpatokan ke 14 kriteria tapi hanya di ambil kalau sudah 9 sudah memadai sudah bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin” (Hasil wawancara dengan HA, pada tanggal 17 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tetap sasaran kepada masyarakat miskin maka setiap desa dimintai untuk mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan penerima program yang layak untuk menerima bantuan. Musyawarah desa atau biasa juga disebut Musdes ini adalah forum pertemuan musyawarah di desa dengan melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan keluarga penerima manfaat program.

Selain itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AM selaku Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

“Kalau untuk di Dinas Sosial sendiri itu kita rata-rata 2-3 perbulannya. Pertama kan ada sosialisasi dulu ditingkat kabupaten kemudian sudah sosialisasi dibikinkan namanya pelaksanaannya oleh skpd penanggung jawab, sk nya dengan tugasnya kemudian kita masing-masing punya tugas, di dinas sosial ditentukan yang kemarin misalnya rumahnya yang harus dibedah, di perbaiki 5 rumah, yang menentukan nomor rumahnya juga bukan kita yang seenaknya memilih, tidak. Nanti kita disini dibikin tim di survey disana penjajakan kemudian kita data jelas kepala desanya kepala lingkungannya pak RT nya sesuai dengan lokasi kita yang punya Dinas Sosial kalau lokasi SKPD lain yah SKPD lain juga begitu, sudah lengkap datanya apanya kita misalnya ada 5 rumah kerusakannya sekian persen yang mau diperbaiki”. (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 20 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *mappadeceng* ini membutuhkan waktu selama 2-3 bulan untuk melakukan pendataan kepada masyarakat melalui kepala desa serta RT dan RW di setiap desa di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sasaran dalam program *mappadeceng* di Dinas Sosial kabupaten Soppeng adalah masyarakat yang kurang mampu atau tergolong miskin yang dipilih menggunakan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sesuai dengan standar BPS tersebut Pemerintah Desa dapat melakukan pendataan untuk memperoleh rumah tangga yang tergolong miskin.

Berdasarkan hasil uraian dari wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ini sudah berjalan dengan baik dimana dengan menggunakan 14 kriteria tersebut pemerintah desa melakukan

pendataan untuk memperoleh rumah tangga yang tergolong miskin atau rentan miskin yang ada di Kabupaten Soppeng dengan melakukan musyawarah di setiap desa, peserta penerima program *mappadeceng* harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dari hasil pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan, kemudian data tersebut diolah dan diseleksi oleh pusat guna memperoleh calon peserta program *mappacceng*.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program *mappadeceng* sudah terlaksana dengan baik dilihat dari tepatnya sasaran program yang mana memang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin atau rentan miskin, namun sayangnya pada kenyataannya peneliti menemukan bahwa pendataan tidak dilakukan secara langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng melainkan oleh pihak desa, RT dan RW.

b. Sosialisasi Program

Sosialisai program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program *mappadeceng* dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga informasi program *mappadeceng* dapat tersampaikan kepada masyarakat penerima program.

Sosialisasi mengenai program *mappadeceng* telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Januari 2018 di Ruang Pola Kantor Bupati Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata, Kecamatan

Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng. Peserta yang turut hadir dalam sosialisasi terdiri dari Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda, para asisten Setda, Kepala Bagian Setda, para Camat beserta Lurah/Kades se-Kab.Soppeng serta kepala SKPD yang terkait dalam Program *Mappadeceng*. Tujuan pelaksanaan sosialisasi program *mappadeceng* adalah untuk mensukseskan pemberdayaan Fakir Miskin dalam hal pengentasan kemiskinanyang ada di Kabupaten Soppeng. Sebagaimana dikatakan oleh Kabid Litbang Kabupaten Soppeng, beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasinya itu dulu waktu pertama ditingkat kabupaten, kemudian ditingkat kecamatan tetapi untuk desa kelurahan itu lebih kepada sosialisasi langsungnya pak desa pak lurah atau masyarakat tetapi untuk kita di pemerintah daerah kita lakukan sosialisasi di tingkat kabupaten mengundang semua stakeholder yang terkait sampai desa kelurahan kemudian nanti mereka yang secara langsung meninformasikan ke warganya masing-masing” (Hasil Wawancara dengan NI, pada tanggal 25 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Program *Mappadeceng* kepada kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Soppeng khususnya warga yang kurang mampu dilakukan oleh masing-masing SKPD serta camat dan perangkat desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasinya itu kita masing-masing per SKPD untuk Dinas Sosial sendiri kami sebelumnya sudah melakukan sosialisasi bersama seluruh pemerintah desa dan camat yang ada di Kabupaten Soppeng serta perangkat desa, tetapi untuk sosialisasi ke masyarakat itu disampaikan oleh desa kelurahan masing-masing mengenai

informasi program *mappadeceng* kepada masyarakat untuk memenuhi syarat serta masyarakat yang kurang mampu untuk diarahkan lebih lanjut” (Hasil Wawancara dengan SES, pada tanggal 17 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng bersama dengan seluruh pemerintah desa, camat yang ada sekabupaten soppeng dan memberikan arahan kepada setiap desa kelurahan untuk sosialisasi secara langsung ke masyarakat terkait dengan program *Mappadeceng*.

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan diatas dalam program *mappadeceng* ini sudah jelas bahwa sosialisasi ini dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat, dalam sosialisasi ini disampaikan tujuan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam program *mappadeceng*.

Namun berbeda dengan masyarakat Kabupaten Soppeng. Tidak semua masyarakat tau tentang program pemerintah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau program *mappadeceng* sudah pernah disampaikan nak waktu pendataan dari desa tapi kalo waktu sosialisasi saya tidak hadir nak.”(wawancara dengan LT, pada tanggal 27 Desember 2020)

“Pernah saya dengar itu program *mappadeceng* nak, dikasih tau sama tetangga waktu itu kalau ada bantuan dari pemerintah”. (wawancara dengan HE, pada tanggal 28 Desember 2020)

“Saya tau program *mappadeceng* dari tetangga nak, saya juga jarang ke kantor desa untuk ikut sosialisasi karna saya juga tinggal sendiri kalau ada apa-apa paling tetangga yang kasih tau saya, itu juga kalo ada pengambilan beras di desa saya dibantu sama tetangga untuk

ambilkan” (Wawancara dengan FA, pada tanggal 28 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum terlalu paham dan mengerti tentang program *mappadeceng* di karenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan pemerintah desa tidak secara langsung atau menyeluruh ke masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng peneliti mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kepala SKPD, camat dan perangkat desa. Dan untuk sosialisasi kepada kelompok sasaran atau masyarakat hanya dilakukan oleh perangkat desa.

Dari pernyataan beberapa masyarakat diatas peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ini hanya diketahui oleh pemerintah daerah sedangkan masyarakat masih sebagian yang mengetahuinya. Keberhasilan sosialisasi program akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program *mappadeceng* yang ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut. Maka dari itu sebaiknya dari pihak Dinas Sosial Sosial haruslah berusaha untuk meningkatkan proses sosialisasi sekaligus mencari inovasi baru dalam proses sosialisasi program ini.

c. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program, tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai dalam pelaksanaannya.

Pencapaian tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tujuan dari program *mappadeceng* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mememberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam program *mappadeceng* ini telah terangkum beberapa kegiatan program *mappadeceng* yang ditujukan secara khusus kepada kelompok sasaran. Kegiatan-kegiatan yang diadakan Dinas Sosial dalam program *Mappadeceng* ini berupa pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program Beras Sejahtera (Rastra), pendataan untuk rumah miskin (bedah rumah), dan juga program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan menetapkan tujuan, pelaksanaan program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Sekertaris Dinas Sosial Kab. Soppeng :

“Menurut saya sudah tercapai tujuannya yah, Inikan program gotong royong kenapa dikatakan program gotong royong karena program ini dilaksanakan oleh semua skpd semua instansi dinas, dalam hal kegiatan program *mappadeceng* ini ada tugas pokok fungsi dinas

sosial disitu pertama kita mendata bagaimana program-program di lokus itu sudah tersentuh, seperti program dulu kita mengenal RASKIN kemudian beralih ke Beras sejahtera (RASTRA). Kemudian yang kedua itu kita melakukan rehabilitasi rumah tinggalnya, itu kita data kita lihat mana tempat tinggal warga itu ya secara lokusnya yang ditentukan yang tidak layak huni. Kita rombak rumahnya, kamarnya kita tata, rumahnya di cat dibersihkan dan terutama jambannya/MCK nya ya kalau tidak ada kita juga SKPD yang membuatkan. Yang ketiga itu ada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu bantuan untuk pemberdayaan ekonomi secara kelompok biasanya terdiri dari 10 orang dalam satu kelompok itu, usahanya pun berbagai jenis” (Hasil Wawancara dengan SES, pada tanggal 15 Desember)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa program *mappadeceng* ini juga dikenal sebagai program gotong royong dimana program ini dilaksanakan oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Soppeng. Di setiap SKPD juga mempunyai program dan kegiatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagai berikut :

“Kalo di sosial sendiri saya rasa sudah sesuai tujuannya ya, kemarin itu kita ada berapa untuk melaksanakan kegiatan untuk masing-masing skpd. Di dinas sosial itu meliputi pertama yaitu pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program Rastra kalo misalnya dia tidak dapat kemudian kita ajukan, yang kedua kita ada untuk masyarakat yang punya usaha kita bantu dengan bantuan Kube nah terus kita juga memperbaiki atau merehap disitu tempat kediamannya rumahnya kita bersihkan cat, pagarnya belum ada kita bikinkan pagar kemudian mck nya itu sanitasi lingkungannya ya, tetapi sekarang program bedah rumah sudah diambil alih oleh Dinas permukiman ” (Hasil wawancara dengan HA, pada tanggal 17 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan program ini

sudah sesuai tujuan dengan melaksanakan 3 program kegiatan yaitu, Rastra, Kube dan bedah rumah. Tetapi kegiatan bedah rumah telah menjadi kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Soppeng pada tahun 2019.

Tabel 4.6 Jumlah penerima program Rastra (2018-2020)

| No. | Kecamatan | Desa/Kel | Jumlah KPM |
|--------------|-------------|----------|--------------|
| 1. | Marioriwawo | 13 | 290 |
| 2. | Citta | 4 | 60 |
| 3. | Lilirilau | 12 | 150 |
| 4. | Liliriaja | 8 | 110 |
| 5. | Lalabata | 10 | 394 |
| 6. | Ganra | 4 | 80 |
| 7. | Donri-Donri | 9 | 198 |
| 8. | Marioriawa | 10 | 180 |
| Total | | | 1.462 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Tabel 4.7 Data penerima program Kube 2020

| No. | Kecamatan | Desa/Kel | Nama Kelompok Kube | Jenis Usaha | Jmlh Ang. | Jmlh Anggaran |
|---------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 1. | Marioriwawo | Labessi | Mawar | Pembuatan Kue | 5 | Rp.10.000.000 |
| 2. | Lilirilau | Ujung | Bronies Mantul | Pembuatan Kue | 5 | Rp.10.000.000 |
| 3. | Lalabata | Lalabata Rilau | Tiga Putra | Pembuatan Pipang | 5 | Rp.10.000.000 |
| | | | Bhusyra Tailor | Menjahit | 10 | Rp.20.000.000 |
| | | Bila | Rahma 2R | Pembuatan Kue | 10 | Rp.20.000.000 |
| 4. | Marioriawa | Manorang Salo | Rina Taylor | Menjahit | 8 | Rp.15.000.000 |
| Jumlah | | | | | | Rp. 85.000.000 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Tabel 4.8 Data penerima program bedah rumah (2018)

| No. | SKPD | Kel/Desa | Jumlah |
|--------------|---|------------|-----------|
| 1. | Dinas Sosial | Timusu | 5 |
| 2. | Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil | Citta | 5 |
| 3. | Dinas Kesehatan | Ganra | 5 |
| 4. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bila | 5 |
| 5. | Dinas Lingkungan Hidup | Labokong | 5 |
| 6. | Dinas Priwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Kebo | 5 |
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Labessi | 5 |
| 8. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Congko | 5 |
| 9. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pattojo | 5 |
| 10. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ujung | 5 |
| 11. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Attangsalo | 5 |
| 12. | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM | Enrekeng | 5 |
| 13. | Dinas Perhubungan | Kaca | 5 |
| 14. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Lemba | 5 |
| 15. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sering | 5 |
| 16. | Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan | Marioriaja | 5 |
| 17. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Patampanua | 5 |
| 18. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan | Tinco | 5 |
| Total | | | 90 |

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tujuan Program *Mappadeceng* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau rentan miskin melalui program-program bantuan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Program *mappadeceng* ini mulai

dilaksanakan pada tahun 2018, untuk kegiatan program Rastra pada tahun 2019-2020 dengan jumlah penerima sebanyak 1462 KPM x 10.000,- x10 Kg x 12 bulan = 1.754.400.000,- APBD yang digunakan, berbeda pada tahun 2018 dilaksanakan hanya 9 bulan pada bulan April yaitu dengan anggaran sebesar 1.315.000.000,-. Untuk kegiatan Kube sendiri dilaksanakan kembali pada tahun 2020 dengan jumlah kelompok sebanyak 6 kelompok dari 43 jumlah keseluruhan anggota. Dan yang terakhir kegiatan program beda rumah, program ini sendiri hanya dilaksanakan pada tahun 2018 oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dengan jumlah penerima sebanyak 5 rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Program ini sendiri dilaukan secara gotong royong oleh 18 pihak SKPD yang ada di Kabupaten Soppeng tetapi pada tahun 2019 program ini telah berpindah menjadi kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Soppeng yang menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng hanya memiliki 2 kegiatan program yaitu Raskin dan Kube yang masih berjalan sampai saat ini.

Adapun pendapat dari penerima program dengan adanya program *mappadeceng* ini dalam membantu masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, sebagai berikut :

“Sangat membantu dek, apalagi pas covid ini kan penghasilan susah, barang ku banyak yang *expired* juga. Terus inikan juga kerjanya sama-sama dengan yang lain bantuannya itu berupa barang toh nilainya sekitar 10 jt”. (Hasil wawancara dengan SA, pada tanggal 26 Desember 2020)

“Membantu sekali nak, kemarin ini rumah ku seng nya sudah bocor, lantai sama dinding kayunya sudah lapuk terus digantikan dengan yang baru”. (Hasil wawancara dengan IB, pada tanggal 27 Desember 2020)

“Iye sangat membantu nak, semenjak ada bantuan beras ini saya jadi nda pusing pikir mau beli beras lagi”. (Hasil wawancara dengan LU, pada tanggal 27 Desember 2020)

Dari hasil wawancara yang diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan untuk program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng telah tercapai dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dinas sosial kabupaten soppeng terutama dalam membantu dikalangan masyarakat miskin, dilihat dari program *mappadeceng* dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok.

Berdasarkan uraian wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan program *mappadeceng* di Kabupaten Soppeng telah tepat sasaran, namun dalam proses pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dari hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Sosial sedikit terhambat dikarenakan masalah yang terjadi akhir-akhir ini yaitu *covid 19* yang mengakibatkan beberapa masyarakat belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut lebih baik jika pihak pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganannya dengan menerapkan strategi untuk menangani situasi dimasa ini.

d. Pemantauan Program

Pemantauan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaannya kemudian mengambil tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pemantuan program yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan diikutinya kegiatan program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada penerima program *mappadeceng*. Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya program ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial:

“Untuk pemantauannya sendiri itu kita pihak Dinas Sosial sudah pernah melakukan pemantauan biasanya ini kita laksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten yang kita lakukan itu pertama kita ketahui dulu bagaimana perkembangan sama permasalahannya sehingga dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” (Hasil wawancara dengan SES, pada tanggal 15 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan terhadap program *mappadeceng* sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat di atasi, untuk mengetahui kaitan antara kegiatan dan tujuan untuk memperoleh kemajuan dalam pelaksanaan program, dan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.

Hal senada juga dikatakan oleh Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, sebagai berikut :

“Iya, kami Dinas Sosial memang melakukan pemantauan kepada masyarakat , yang pertama kita lakukan pembinaan terlebih dahulu setelah itu kita monitoring dan evaluasi baik itu dari pihak penerima Rastra, Kube maupun bedah rumah. Kita biasanya turun ke rumah warga atau ke tempat usahanya langsung” (Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal 21 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pemantauan yang pertama pembinaan, pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan program, pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan program dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga berjalan sesuai dengan rencana.

Adapun pemantauan program *mappadeceng* dalam pelaksanaannya di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ini juga di ungkapkan oleh masyarakat yang memanfaatkan program *mappadeceng* sebagai berikut :

“Pernah nak, ada dulu datang tim pengawas dari pihak Dinas Sosial ditanya-tanya alatnya ada yang rusak atau tidak” (Hasil wawancara dengan RA, pada tanggal 26 Desember 2020)

“Pernah, pas corona ini nak. biasanya kalau tidak dapatki beras beberapa bulan kita kasih tau tim pengawasnya dari desa nanti dia kasihki misalnya kemarin tidak terima ka selama 3 bulan langsung di kasih 3 karung sekaligus” (Hasil wawancara dengan LA, pada tanggal 27 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas dengan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pemantauan program *mappadeceng* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ini pemantauan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai program *mappadeceng* bahwa proses pemantauan yang dilakukan sudah cukup baik dilihat dari pemantauan itu dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan pihak pemerintah desa yang turun langsung kelapangan. Namun sayangnya peneliti masih menemukan fakta dilapangan masih banyaknya masyarakat yang terlambat mendapat bantuan beras (rastra), hal tersebut sangat disayangkan, apalagi pada masa *covid19* ini masyarakat sangat memerlukan bantuan dari pemerintah, akan lebih baik lagi jika pemerintah desa dan Dinas Sosial melakukan inovasi dalam proses pemantauan pelaksanaan program ini.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan dilapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas menurut Budiani. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan efektivitas program melalui beberapa indikator, diantaranya ketepatan sasaran

program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang efektivitas program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, maka peneliti menemukan hal sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merupakan target atau sasaran dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program *Mappadeceng* di Kabupaten Soppeng dengan maksud agar program ini menjadi program yang dapat membantu masyarakat miskin atau kurang mampu yang ada di Kabupaten Soppeng. Dalam penelitian ini ketepatan penentuan siapa saja sasaran program *mappadeceng* yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin yang termuat dalam Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipilih melalui beberapa kriteria menurut standar BPS.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), pada indikator ketepatan sasaran program yaitu dengan melihat sejauh mana data penerima program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sesuai dengan sasaran yang tepat yang sudah ditentukan oleh kriteria BPS. Ketepatan sasaran program ini dinilai sudah tepat sasaran meskipun belum sepenuhnya. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan masyarakat miskin dari target penerima memang sudah dilakukan pendataan dari pemerintah

desa sesuai dengan kriteria dari BPS, namun sayangnya dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pendataan tidak dilakukan secara langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng melainkan oleh pihak desa, RT dan RW.

b. Sosialisasi Program

Sosialisai program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program *mappadeceng* dalam melakukan sosialisasi tersebut, sehingga informasi program *mappadeceng* dapat tersampaikan kepada masyarakat penerima program.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), pada indikator Sosialisasi Program yaitu kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dalam melakukan sosialisasi program *Mappadeceng*, sehingga informasi program dapat tersampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi program ini dinilai belum efektif dan maksimal dikarenakan Pemerintah daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berakibat masyarakat setempat kurang tahu mengenai maksud dari program dan sebaiknya ada inovasi dalam sosialisai sehingga masyarakat penerima tahu tentang informasi mengenai program *Mappadeceng*.

c. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai dalam pelaksanaannya. Tujuan dari program *mappadeceng* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), pada indikator pencapaian tujuan program yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam program *mappadeceng* ini telah terangkum beberapa Kegiatan-kegiatan yang diadakan Dinas Sosial dalam program *Mappadeceng* ini berupa pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program Beras Sejahtera (Rastra), pendataan untuk rumah miskin (bedah rumah), dan juga program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini dinilai sudah cukup efektif dikarenakan sudah dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, dimana program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sangat membantu kalangan masyarakat miskin, dilihat dari program *mappadeceng* dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok .

Namun sayangnya peneliti menemukan bahwa kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Sosial sedikit terhambat dikarenakan masalah yang terjadi akhir-akhir ini yaitu *covid 19* yang mengakibatkan beberapa masyarakat belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut lebih baik jika pihak pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganannya dengan menerapkan strategi untuk menangani situasi dimasa ini.

d. Pemantauan Program

Pemantauan merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaannya program ini berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017), pada indikator pemantauan program yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah kegiatan program dilakukan sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada penerima program *mappadeceng*. Pemantauan ini dinilai sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Namun sayangnya peneliti masih menemukan fakta dilapangan masih banyaknya masyarakat yang terlambat mendapat bantuan

beras (rastra), hal tersebut sangat disayangkan, apalagi pada masa *covid19* ini masyarakat sangat memerlukan bantuan dari pemerintah, akan lebih baik lagi jika pemerintah desa dan Dinas Sosial melakukan inovasi dalam proses pemantauan pelaksanaan program ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan efektivitas pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan indikator efektivitas menurut Budiani (2017), yaitu dalam segi sosialisasi program yang belum maksimal hal ini dikarenakan sosialisasi ke masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh. Namun beberapa indikator yang sudah tercapai yaitu ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program yang telah tercapai dengan cukup efektif. Namun sayangnya perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaannya, diharapkan kedepannya pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Soppeng lebih mengoptimalkan programnya dari segala aspek demi tercapainya visi misi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program *Mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Untuk efektivitas ketepatan sasaran program dalam pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dapat dikatakan cukup efektif dimana dalam penentuan sasaran penerima program menggunakan kriteria standar BPS tersebut pemerintah desa melakukan pendataan untuk memperoleh rumah tangga yang tergolong miskin atau rentan miskin yang ada di Kabupaten Soppeng, peserta penerima program *mappadeceng* harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dari hasil pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan, kemudian data tersebut diolah dan diseleksi oleh pusat guna memperoleh calon peserta program *mappacceng*.
2. Untuk efektivitas sosialisasi program mengenai penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng kepada penerima program *mappadeceng* maupun masyarakat umum belum dilaksanakan dengan efektif, dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas maksud dari program *mappadeceng*, hal ini dikarenakan sosialisasi ke masyarakat dan penyampaian informasinya tidak menyeluruh

3. Untuk efektivitas tujuan program dalam pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng ini sudah efektif karena dinilai mampu mencapai tujuanyang diharapkan, dilihat dari program *mappadeceng ini* dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok.
4. Untuk efektivitas pemantauan program dalam pelaksanaan program *mappadeceng* di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng pemantauan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan tujuan program dilaksanakan dengan optimal. Hasil yang didapat dalam pemantauan ini sudah efektif dimana pemantauan yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak Dinas Sosial dan pemerintah desa yang turun langsung kelapangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng agar program *mappadeceng* dapat terus berjalan dengan efektif, yakni :

1. Sebaiknya pihak Dinas Sosial Kabupaten Soppeng melakukan survey dan mendata penduduk miskin di suatu daerah harus turut berperan aktif dalam mendata masyarakat miskin.

2. Sosialisasi perlu ditingkatkan karena penerima informasi yang baik dan lengkap sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menjalankan program terutama program *mappadeceng*.
3. Pemantauan setelah program memang sudah efektif namun harus dioptimalkan lagi dengan melakukan secara rutin tugas memonitoring kegiatan pelaksanaan program terutama program *mappadeceng*.
4. Program-program pengentasan kemiskinan di tambah lagi demi kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Soppeng.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. Presentase Penduduk Miskin Maret 2019. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2016. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng. Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2017. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng. Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng. Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama
- Kabupaten Soppeng. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Mappadeceng* Soppeng.
- Khadafi, Mutiarin. *Journal of Governance And Public Policy*, Vol.4, No.2, 2017: *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Khomsan, Ali, dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Laksono, RS. 2017. *Efektivitas Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Studi kasus di desa Tenggerlor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Lestari, AF. 2016. *Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Moenir, H.A.S.2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:PT.Bumi Aksara
- Mustafa, AA. 2015. *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar*.Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Nurjanah, Ida. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.Jakarta : Sekretarian Negara.
- Prichatin, Asti. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*. IAIN Purwakerto.

Putra, Dicky Pradana. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.*

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta:CAPS

Yuliani. 2017. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung.* Univeritas lampung.



RIWAYAT HIDUP



Cindy Vatika Sari. Lahir pada tanggal 09 Mei 1999 di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Anak keempat dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Palesangi dan Ibu Ma'awia. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 242 Balubue pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Donri-Donri dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Watansoppeng dan lulus pada tahun pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S1).

